

PERAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN RASA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN

Ratu Muslimah, Umi Chotimah, Emil El Faisal

FKIP, Universitas Sriwijaya

Email: ratumusilamh95@yahoo.com

Abstrack: *This study aims to analyze the role of National Assimilation Forum (FPK) in order to increase the sense of unity and community unity in District Banyuasin III Banyuasin District. The type of research is descriptive qualitative. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques are done through documentation, interviews and observation. While the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the role of National Assimilation Forum (FPK) in order to increase the sense of unity and community unity in Banyuasin District III Banyuasin Regency has not been implemented optimally.*

Keywords: *Role of Forum of National Association (FPK), Unity and United*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin belum terlaksana secara optimal.

Kata kunci : Peran Forum Pmbauran Kebangsaan (FPK), Persatuan dan Kesatuan

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten ini terdiri dari 19 Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 904/KTSP/BPBD Kesbangpol/2013 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyuasin (dalam pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), 2013:20-21) memiliki beberapa jumlah suku yang beragam yaitu, antara lain suku Banyuasin,

suku Sekayu, suku Madura, suku Aceh, suku Padang, suku Palembang, suku Batak, suku Lahat, suku Muara Enim, suku Komering, suku Bengkulu, suku Sunda, Etnis Cina, suku Bugis, suku Jawa, dan suku Lampung. Keberagaman suku, ras, etnis dan agama yang ada di Kabupaten Banyuasin menimbulkan berbagai spekulasi dan pola pikir pendapat yang berbeda. Perbedaan itu tentu memicu adanya ketidaksamaan menjalani kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Selatan

(diolah oleh penulis tahun 2017) Ibu kota Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Banyuasin III yang mempunyai berbagai macam ras, suku, budaya dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai Desa/Kelurahan yang ada di dalam masyarakat di Kecamatan Banyuasin III dengan ciri khas yang berbeda-beda. Dinamika kehidupan beragama dan suku bangsa di dalam masyarakat Kecamatan Banyuasin III selain diwarnai adanya kehidupan yang harmonis dan rukun, dalam skala kecil terkadang timbul perselisihan atau perbedaan pemahaman yang berkembang menjadi potensi konflik yang besar karena masih kurangnya kesadaran persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Selama ini permasalahan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang berkaitan dengan konflik antar penduduk, suku, etnis dan agama di Kabupaten Banyuasin belum memiliki lembaga khusus yang menjadi wadah untuk menjangkau aspirasi, keluhan dan sebagai penengah di setiap masalah yang berkaitan dengan konflik antar penduduk, suku, etnis dan agama di Kabupaten Banyuasin. Pada pemilihan tahun 2013, kelima pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin didominasi oleh putra daerah Banyuasin. Sehingga, seolah-olah putra daerahlah yang paling layak untuk dipilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Banyuasin. Dari kejadian di atas, maka pasangan Bupati yang terpilih segera membentuk FPK sebagai lembaga yang bertugas untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat serta menjadi media penyelesaian konflik dalam masyarakat di Kabupaten Banyuasin.

FPK sebagai wadah aspirasi masyarakat Banyuasin dibentuk dengan melibatkan suku-suku yang ada di Kabupaten Banyuasin sebagai anggota yang mengurus dan melaksanakan kegiatan FPK. Kelompok adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan

keanggotaannya dan saling berinteraksi. Interaksi bertujuan untuk menggabungkan pendapat dan pemikiran yang berkembang di antara personal tersebut.

Salah satu organisasi yang dijadikan sebagai wadah komunikasi masyarakat atau tempat berdiskusinya para pemuka adat/suku dalam membahas konflik yang berhubungan dengan ras, etnis dan suku bangsa adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pada Pasal 1 ayat (1) (dalam pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), 2013:2) menyebutkan bahwa.:

“Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (4) Forum Pembauran Kebangsaan yang disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.”

Terbentuknya FPK di Kabupaten Banyuasin didasari atas keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah pada pasal 9 (dalam pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), 2013:4-5). FPK Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati

Banyuasin Nomor 904/KPTS/BPBD-Kesbangbol/2013 bahwa FPK mempunyai tugas, peran, serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan
- b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kebangsaan

Selanjutnya adapun peran FPK di Kecamatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah pasal 9 ayat (3) (dalam pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), 2013:4) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan
- b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat
- c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan
- d. Merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan

Peran dan tugas FPK tidak lepas dari empat pilar dasar Bernegara yaitu Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif yang menginginkan adanya perubahan sinergi agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota FPK yang mempunyai peran masing-masing dalam melaksanakan berjalannya kegiatan yang ada di dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Banyuasin III pada bulan maret tahun 2016. Peneliti melakukan wawancara kepada Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin. Peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Banyuasin termasuk Kecamatan Banyuasin III yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (dalam pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), 2013) sehingga didapatkan kesimpulan bahwa peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ditujukan untuk membina, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta diharapkan dapat menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya dari berbagai ras, suku dan etnis.

Dari permasalahan yang ada, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran FPK agar dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran FPK dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran FPK di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten

Banyuasin. Penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan di Kabupaten yang memiliki berbagai perbedaan dari segi ras, suku, budaya dan agama yang dapat di pahami secara teoritis maupun secara praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memaparkan serta menggambarkan dari data primer dan sekunder yang didapat. Dalam penelitian kualitatif, populasi dan sampel digunakan sebagai acuan untuk menentukan Informan Penelitian. Maka Populasi atau subjek penelitian adalah seluruh anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuasin periode 2013-2017, sedangkan yang menjadi sampel adalah informan, yaitu Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, pemuka masyarakat (ketua FPK), pemuka adat (wakil ketua FPK), pemuka suku (anggota FPK) dan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III.. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan teknik sampel *purposive sampling*. Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu peran FPK dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Penggunaan variabel tunggal bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam merumuskan objek atau inti penelitian yang hanya terdiri dari satu objek penelitian.

Dalam melakukan penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sehingga peneliti menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara umum data tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hasil

evaluasi kegiatan, dan data lainnya yang berkaitan dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang diperoleh dari Kesbangpol Kabupaten Banyuasin serta foto-foto kegiatan-kegiatan penelitian selama peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Banyuasin III. Teknik Observasi dilakukan untuk mengetahui data kegiatan dan data yang diperlukan dari informan, dan teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara umum mengenai Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kecamatan Banyuasin III. Analisa data diolah menggunakan metode teknik analisis data tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk uji keabsahan data digunakan beberapa uji antara lain uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan pada bulan Maret tahun 2016 yang dilakukan di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini, Kecamatan Banyuasin III dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya Desa Pangkalan Balai yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Banyuasin. Sehingga secara otomatis tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Banyuasin III memiliki keanekaragaman dari berbagai suku, etnis dan budaya. Studi pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peranan FPK dalam pelaksanaan kegiatan pada masyarakat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 21 orang perangkat FPK yang terdiri dari ketua dan anggota selaku pemuka suku. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari Ketua FPK, Wakil Ketua FPK, Pemuka Suku (suku Banyuasin, suku Lahat, suku Jawa, suku bugis) dan satu

orang pegawai dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) selaku sekretariat FPK yang dianggap berkompeten dan mampu membantu peneliti menganalisis serta menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik dokumentasi, teknik observasi dan teknik wawancara. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Febuari s.d 13 Maret 2017. Untuk lebih jelas mengenai pelaksanaan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1	24 Januari 2017	Peneliti mendatangi dekanat FKIP Universitas Sriwijaya untuk membuat surat izin penelitian di Lingkungan Kecamatan Banyuasin III.
2	10 Febuari 2017	Peneliti mendatangi Kesbangpol Kabupaten Banyuasin untuk meminta izin penelitian serta izin pengambilan data-data yang diperlukan.
3	27 Febuari s.d 11 Maret 2017	Peneliti melakukan wawancara kepada sekretariat Kesbangpol Kabupaten Banyuasin, ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), wakil ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan pemuka suku di Kecamatan Banyuasin III yang dijadikan sampel penelitian.
4	11 Maret s.d 13 Maret 2017	Peneliti melakukan analisis data yang didapat dari hasil penelitian.

Sumber : data primer diolah, Tahun 2017

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis peran dari FPK di Kabupaten Banyuasin. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuasin didirikan oleh Bupati selaku Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan ditunjuklah pemuka masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang dianggap memiliki pengetahuan dan memahami adat istiadat di Kabupaten Banyuasin sebagai ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Masa jabatan ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) selama 4 tahun. Data ini berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin 904/KPTS/BPBD-KESBANGPOL/2013 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Sekretariat Kabupaten Banyuasin Periode 2013-2017.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Tabel 2 Visi dan Misi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

VISI	MISI
Terwujudnya Indonesia mini di Kabupaten Banyuasin yang bersatu, maju, damai, adil dan makmur dalam NKRI.	Mewujudkan Pancasila sebagai ideologi Negara, UUD 1945, sebagai sumber dari segala hukum yang mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan globalisasi.
Terwujudnya semangat kegotong royongan dalam	Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dan peningkatan

kemajemukan, demokratisasi, partisipatif dan bermoral mulia.	sosial antar umat beragama, suku/ras, budaya, bahasa, dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati.
Terwujudnya serta meningkatkan ekonomi rakyat, pendidikan dan menghargai perbedaan dan persaingan yang sehat.	Mewujudkan peningkatan pendidikan, kemakmuran, kesejahteraan dan peningkatan sumberdaya manusia yang tangguh.

Sumber: data dokumentasi arsip Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tahun 2013

Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Banyuasin yang masih terbilang baru, sehingga anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) perlu mengadakan pembinaan dan sosialisasi ke Kecamatan dan Desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuasin agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), memahami tugas dan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta dapat menjadikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah penyampaian aspirasi dan tempat mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat menampung aspirasi masyarakat di desa-desa maka ditunjuklah pemuka suku sebagai mediator penyampai aspirasi dan bertugas memberikan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III. Seperti yang diungkapkan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Kabupaten Banyuasin dalam hasil wawancara berikut ini:

“Dalam memberikan arahan, kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bekerjasama dengan KESBANGPOL Kabupaten Banyuasin selaku sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mengadakan seminar dan pelatihan meningkatkan kemampuan pemuka suku dalam memberikan arahan serta menampung aspirasi masyarakat di daerah masing”

Sebagai wadah yang menampung aspirasi pada masyarakat khususnya Kecamatan Banyuasin III Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan mengumpulkan dan menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsaan dengan cara melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Berikut hasil wawancara Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin:

”Pembinaan yang dilakukan oleh FPK kepada masyarakat, kepengurusan FPK baik anggota dan pemuka suku berusaha memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, menjaring aspirasi masyarakat, menyelenggarakan forum dialog, memberikan materi wawasan kebangsaan seperti nilai-nilai pancasila dan menyelenggarakan sosialisasi yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan, tujuan pembinaan FPK mengadakan sosialisasi ke setiap kecamatan untuk membuat keakraban dan keharmonisan masyarakat lebih terjalin. Upaya yang mereka lakukan biasanya dengan cara mengumpulkan

masyarakat disetiap kecamatan dengan suku-suku yang terkait biasanya masyarakat hanya dipanggil 50 orang saja tentu saja dalam hal ini dibantu oleh pihak atau tim anggota FPK dari Kabupaten Banyuasin dan dalam setiap sosialisai tersebut anggota FPK memberikan penjelasan materi mengenai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya apabila ada masalah terutama berhubungan dengan suku maka diselesaikan secara musyawarah dimana dalam hal ini pemuka suku masing-masing dipanggil untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.” (Wawancara: 08 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam mensosialisasikan tugas dan pelaksanaannya cukup baik karena Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dianggap mampu memberikan pemahaman mengenai keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ditengah-tengah masyarakat sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan antar suku atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan observasi selama penelitian, peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam Aspek Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di Kecamatan Banyuasin III sudah cukup baik, karena Pembinaan yang dilakukan oleh Forum Pembauran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 904/KPTS/BPBD-KESBANGPOL/2013

tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Sekretariat Kabupaten Banyuasin Periode 2013-2017.

Dalam pelaksanaannya FPK berperan mengadakan sosialisasi tiap bulan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Banyuasin III. Berdasarkan dari hasil wawancara selama penelitian, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), masyarakat menilai bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa masyarakat bahwa sosialisasi tersebut belum merata dilakukan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin III, karena terdapat beberapa desa di Kecamatan Banyuasin III belum pernah diadakan sosialisasi oleh kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah kesulitan menempuh akses menuju ke beberapa desa tersebut yang belum terjangkau oleh kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Sehingga sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dapat dikatakan belum optimal.

Dari hasil wawancara dengan ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang juga merupakan tokoh masyarakat di Kabupaten Banyuasin bahwa cara menyatukan perbedaan antar anggota Pembauran Kebangsaan (FPK) yaitu dengan cara berdialog dan mengadakan rapat setiap bulan sekaligus menjadi ajang silaturahmi anggota Pembauran Kebangsaan (FPK) agar lebih terjalinnya komunikasi dalam setiap perbedaan yang ada. Berikut uraian wawanacara tersebut.

“Kami selaku pengurus FPK mengadakan rapat setiap bulan guna membahas permasalahan di dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan suku dalam rapat tersebut setiap pemuka suku selaku anggota FPK akan memberikan aspirasi atau saran yang disampaikan masyarakat dalam masing-masing suku yang disampaikan kepada pemuka suku rapat ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi para anggota FPK dan dalam rapat tersebut juga akan membahas program-program kegiatan FPK kedepan jadi untuk melancarkan program kerja tersebut dibutuhkan kekompakan para anggota atau pengurus FPK itulah mengapa FPK mengadakan rapat setiap bulan”. (Wawancara, 09 Maret 2017).

Pelaksanaan forum dialog dan kegiatan rapat yang diadakan oleh kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tersebut dapat membantu masing-masing anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kegiatan forum dialog ini juga dapat menjaga tali silaturahmi antar anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan masyarakat serta dapat mempermudah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk saling berdiskusi membahas permasalahan yang ada di daerah mereka dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuwangi :

“Konflik pasti ada didalam FPK terutama dalam masyarakatnya misalnya perbedaan pendapat atau pandangan hal itu mudah mulai memicu adanya konflik, nah disinilah peran anggota FPK, apabila ada konflik di

suatu desa yang berhubungan dengan suku ataupun kelompok masyarakat, contoh suku Jawa dan suku Padang, maka FPK Kabupaten Banyuwangi melalui kepengurusan FPK dikecamatan memanggil Pemuka suku yang terkait, dan pemuka suku tersebut memanggil kepengurusan FPK yang ada didesa, melalui musyawarah dan berdialog mereka yang berkonflik tadi dipanggil dan dicarikan jalan tengah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut”. (Wawancara, 09 Maret 2017)

Berdasarkan wawancara di atas terdapat konflik yang sering terjadi diantara masyarakat, konflik tersebut biasanya dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pandangan yang mudah memicu konflik, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai salah satu wadah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang ada dengan cara memberikan saran dan solusi guna menyelesaikan masalah atau konflik tersebut terutama yang berkaitan dengan suku. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dilakukan dengan cara mengumpulkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan pihak yang berkonflik untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Dari data yang didapat dan hasil observasi dilapangan program kerja yang diagendakan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk melaksanakan forum dialog dan rapat setiap bulan tidak berjalan secara efektif. Fakta dilapangan pelaksanaan rapat belum berjalan setiap bulan. Hal ini menyebabkan kurangnya peranan dan perhatian kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terhadap permasalahan

yang ada di dalam masyarakat sehingga pemuka suku yang seharusnya menjadi penyampai informasi antara masyarakat dan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tidak terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi seharusnya.

Permasalahan ini menyebabkan konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah menjadi konflik besar karena lambannya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) harus bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Instansi terkait yang berkompeten dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik apabila permasalahan sudah tidak dapat ditangani sendiri oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Dari hasil observasi selama penelitian, indikator aspek penyelenggaraan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan pemuka adat, suku dan masyarakat dalam peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kecamatan Banyuasin III belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya yang tidak berjalan secara optimal, karena Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai pihak yang berperan untuk menjadi mediator dalam kelompok yang bermasalah tidak cepat tanggap dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik sering kali tidak berjalan dengan mudah karena permasalahan yang dihadapi terkadang tidak dapat ditangani sendiri oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Sehingga Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mengadakan kerjasama dengan kepolisian dan Instansi yang terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut.

Penerapan Komunikasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui pemuka suku merupakan salah satu upaya untuk mengatur dan memberikan nilai-nilai baik dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banyuasin terutama Kecamatan Banyuasin III. Pelaksanaan penerapan norma tersebut termasuk dalam program Rencana Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuasin tahun 2017, poin Kedua yang berisi: Peningkatan kesadaran masyarakat dan dialog akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa (Rencana Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuasin tahun 2017 terdapat dalam Lampiran).

Dalam aspek pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ada beberapa cara atau upaya dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada dimasyarakat terutama yang berhubungan dengan suku dan kelompok masyarakat. Upaya ini berupa penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antar pihak yang berselisih agar menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya lain yang biasa dilakukan oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah dengan menjadi mediator masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan terhadap pemerintah.

Dari hasil wawancara selama penelitian, aspek Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dalam peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kecamatan Banyuasin III sudah berjalan cukup optimal. Karena pemuka suku dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah menerapkan dan memberikan norma serta nilai yang baik untuk masyarakat. Namun pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang di hadapi oleh

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) karena kegiatan rapat dan musyawarah yang diadakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga kurangnya waktu bagi pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pemuka Suku, dan masyarakat untuk bertemu mendiskusikan permasalahan yang ada serta saling bertukar pemikiran dan nilai-nilai baik yang perlu dibagikan untuk menerapkan norma dan nilai kebaikan pada masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya masyarakat Kecamatan Banyuasin III

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, peranan pemuka suku dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menyebarkan serta memberikan norma dan nilai baik pada masyarakat sudah cukup baik. Pemuka suku selaku penyampai kebijakan dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk dilaksanakan dalam masyarakat sudah berperan cukup baik dengan memberikan petunjuk nilai dan norma kebaikan di setiap kesempatan yang ada. Seperti misalnya pada saat adanya kegiatan yang di adakan oleh Karang Taruna, IRMAS, Forum diskusi masyarakat, dan kegiatan lainnya. Peranan pemuka suku dan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah berupaya memberikan pengarah nilai-nilai kebaikan dan menjadi mediator pengawasan perilaku masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Transparansi kinerja Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menjalankan dan menerapkan nilai serta norma dalam masyarakat sudah sangat baik, karena dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan kegiatan diskusi atau musyawarah dalam masyarakat, pemuka suku dihadirkan untuk menjadi perwakilan masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi atau keluhan yang ada. Selain sebagai perwakilan suku di Kabupaten Banyuasin khususnya di Kecamatan

Banyuasin III, pemuka suku tersebut juga berperan dalam menginformasikan hal-hal apa saja yang telah diperoleh dalam hasil pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang bersifat musyawarah kepada masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan. Namun jika dilihat pada pelaksanaannya, masih banyak kendala yang di hadapi oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) karena kegiatan dan program kerja yang diadakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dari hasil observasi di lapangan yang peneliti lakukan, pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum tepat sasaran karena ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan yang diadakan sehingga peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum dapat dinilai cukup baik. Penilaian terhadap kinerja anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) juga belum maksimal karena Kesbangpol selaku Instansi yang membawai Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum mampu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam melaksanakan tugas serta tidak diperoleh SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum terlaksana berdasarkan peraturan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kendala ini juga yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di lapangan.

Dari keseluruhan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sebagian besar sudah optimal dengan

menjalankan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi oleh Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyuasin khususnya di Kecamatan Banyuasin III.

Penelitian ini telah dibahas serta dianalisis melalui reduksi data. Adapun reduksi data dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin yang berupa laporan-laporan hasil kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), perencanaan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), yang dilaksanakan oleh ketua dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) lainnya yang ada di Kabupaten Banyuasin khususnya Kecamatan Banyuasin III.

Penyajian data yang peneliti lakukan, diharapkan dapat mempermudah suatu gambaran tentang peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Berkenaan dengan hal ini, data yang disajikan merupakan hasil dari analisis data yang dilakukan kepada tujuh orang narasumber yakni, ketua dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), masyarakat Kecamatan Banyuasin III serta sekretariat Kesbangpol Kabupaten Banyuasin sebagai instansi yang menaungi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Banyuasin.

Berikut adalah hasil analisa dari pernelitian ini mengenai peranan FPK dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin:

Tabel 3 Hasil Analisa Penelitian Peranan FPK

Peran FPK Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah Bab IV Pasal 6	Hasil Penelitian Peran FPK di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan Wawancara dan Dokumentasi	Keterangan
1. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan	<p>a. FPK memberikan arahan pembinaan berupa pelatihan kepada pemuka suku (anggota FPK) untuk meningkatkan kemampuan dalam menampung dan memberikan arahan kepada masyarakat Kecamatan Banyuasin III</p> <p>b. FPK berperan menjaring aspirasi</p>	<p>a. Sudah cukup optimal karena permasalahan atau aspirasi masyarakat Kecamatan Banyuasin III ditampung atau diterima oleh pemuka suku dan didiskusikan dengan kepengurusan FPK Kecamatan dan FPK Kabupaten untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah</p> <p>b. belum optimal aspirasi masyarakat tidak</p>

	masyarakat dibidang pembauran kebangsaan di Kecamatan Banyuasin III	seluruhnya tertampung oleh kepengurusan FPK karena jangkauan wilayah menuju beberapa desa di Kecamatan Banyuasin III yang jauh sehingga sulit terjangkau oleh anggota dan pengurus FPK
2. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat	<p>a. FPK berperan mengadakan forum dialog guna memberikan pemahaman untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kecamatan Banyuasin III</p> <p>b. FPK menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan dengan cara menghadirkan pemuka suku dan masyarakat melalui musyawarah dan dialog guna mencari solusi agar tidak terpecah belah dalam kerangka NKRI</p>	<p>a. Belum optimal, karena pelaksanaan forum dialog yang diadakan oleh FPK belum berjalan terlaksanakan tiap bulan di Kecamatan Banyuasin III seperti yang diagendakan program rencana kerja FPK</p> <p>b. Belum optimal, karena masih ada anggota FPK yang kurang sigap dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik sehingga peranan FPK dalam mengatasi konflik tertentu dibantu oleh instansi lain yang berkompeten dimasalah tersebut</p>
3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan	a. FPK memberikan pemahaman berupa wawasan kebangsaan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin	a. Sudah optimal, karena FPK telah menyiapkan bahan materi wawasan kebangsaan yang akan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Banyuasin III

	<p>b. FPK mengajak masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk saling menjaga, menghormati dan menghargai perbedaan suku, etnis, ras dan agama agar dapat sama-sama menciptakan masyarakat Banyuasin yang harmonis dan rukun</p>	<p>b. Sudah optimal, karena dalam memberikan solusi dan menyelesaikan masalah FPK berupaya bersikap adil dan tidak memihak antara satu dengan lainnya</p>
	<p>c. FPK memberikan pemahaman mengenai rasa persatuan dan kesatuan dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi Karang taruna, IRMAS, dan kegiatan organisasi masyarakat lainnya</p>	<p>c. Sudah optimal, karena dalam pelaksanaannya FPK melibatkan Instansi atau lembaga yang berkompeten untuk memberikan materi dalam pelaksanaan kegiatan FPK</p>
<p>4. Merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan</p>	<p>a. FPK berperan mengadakan dan memimpin rapat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kepengurusan FPK</p>	<p>a. Belum optimal, karena dalam setiap kegiatan FPK tidak memiliki SOP</p>
	<p>b. FPK mengajak masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk saling menjaga, menghormati dan menghargai perbedaan suku, etnis, ras dan agama agar dapat sama-sama menciptakan masyarakat Banyuasin yang harmonis dan rukun</p>	<p>b. Sudah optimal, karena dalam memberikan solusi dan menyelesaikan masalah FPK berupaya berperan adil dan tidak memihak antara satu dengan lainnya</p>
	<p>c. untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, FPK bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak kepolisian serta Instansi lainnya yang berhubungan untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat</p>	<p>c. Sudah optimal, FPK bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Instansi lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan</p>

(Sumber: Data diolah tahun 2017, berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara)

Berdasarkan data dalam tabel diatas analisa peran FPK dapat dikatakan belum optimal, karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh FPK dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

SIMPULAN

Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin secara optimal. Alasan yang mendasari penilaian peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum optimal tersebut karena adanya fakta-fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa: Peranan FPK dalam menjangring aspirasi masyarakat Kecamatan Banyuasin III belum berjalan optimal, karena masyarakat yang ada didesa-desa Kecamatan Banyuasin III masih belum banyak memahami kegiatan dan mengetahui keberadaan adanya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menyelesaikan masalah seringkali tidak dapat diselesaikan oleh kepengurusan FPK, sehingga FPK bekerjasama dengan kepolisian dan Instansi yang terkait untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Pelaksanaan program kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum terimplementasi sesuai dengan rancangan kerja yang telah ditetapkan. Peranan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kurang cepat tanggap menyelesaikan konflik atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh FPK

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut : Kepada pihak instansi/lembaga yang berada di Kabupaten Banyuasin, diharapkan untuk lebih

memperhatikan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan menyediakan fasilitas untuk mempermudah kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Banyuasin khususnya Kecamatan Banyuasin III dan Kesbangpol seb agai Instansi yang mengawasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) diharapkan dapat lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan program kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Serta dapat terus mengevaluasi peranan kepengurusan pada pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), sehingga program kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya Kecamatan Banyuasin III diharapkan dapat lebih memperhatikan forum atau lembaga kemasyarakatan yang ada disekitar lingkungan masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari terbentuknya forum atau lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). Banyuasin Dalam Angka (*Banyuasin In Figures*). Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
- Kesbangpol. (2013). Pedoman Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Periode 2013-2017 Kabupaten Banyuasin: Pemerintahan Kabupaten Banyuasin
- Peraturan Menteri Dalam Negeri UU Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah
- SK Bupati Banyuasin. No 904/KTSP/BPBD. Kesbangpol/2013 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
- Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara